

**IMPLIKASI TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR TERHADAP
KEBIJAKAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

**Iqbal Saputra Zana^{1*}, Gusti Naufal Rizky Perdana², Bulan Erika Bato³, Lara Ayu Lestari⁴, Dyah
Rahayuning Perwitasari⁵**

^{1,2,3,4,5} Departemen Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
Email Korespondensi: iqbalsaputrazana@fisip.unmul.ac.id

ABSTRACT

Kutai Kartanegara Regency is one of the main producers of oil and gas in Indonesia, with a significant contribution to the gross regional domestic product of East Kalimantan, particularly from the mining sector. Although the oil and gas sector has a positive impact on the regional economy, the distribution of its benefits to coastal communities is still hampered by economic inequality. This is reflected in poverty data, which shows that although the oil and gas sector's contribution to the GRDP is substantial, poverty rates in coastal areas remain significant. This study identifies the main challenges in natural resource management, including social inequality, environmental degradation, and the lack of local community involvement in decision-making. The study also explores various opportunities for economic diversification through the tourism sector based on ecology and renewable energy, which can provide long-term positive impacts for the community. More inclusive and fair policies are needed to ensure that the benefits of the oil and gas sector are enjoyed equitably, while maintaining environmental sustainability and community well-being. This study uses a literature review method with a qualitative approach, collecting and analysing various literature sources related to oil and gas management policies, their impact on the economy of coastal communities, and challenges in the redistribution of economic benefits. The results of the study show that although the oil and gas sector plays a major role in the economy of Kutai Kartanegara, the distribution of its benefits is still hampered by economic inequality in coastal communities. This study also found that natural resource management faces major challenges, including a lack of local community involvement in decision-making, as well as indications of environmental damage that could threaten the sustainability of coastal ecosystems, despite opportunities for economic diversification through the tourism and renewable energy sectors.

Keywords: Oil and Gas, Coastal Communities, Economic Inequality, Sustainable Development.

ABSTRAK

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu penghasil utama minyak dan gas di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB Kalimantan Timur, terutama dari sektor pertambangan. Meskipun sektor migas memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, distribusi manfaatnya terhadap masyarakat pesisir masih terhambat oleh ketimpangan ekonomi. Hal ini tercermin dalam data kemiskinan yang menunjukkan bahwa meskipun kontribusi sektor migas terhadap PDRB besar, angka kemiskinan di daerah pesisir tetap signifikan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mengulas berbagai peluang untuk diversifikasi ekonomi melalui sektor pariwisata berbasis ekologi dan energi terbarukan, yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan adil untuk memastikan bahwa manfaat sektor migas dapat dinikmati secara merata, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait kebijakan pengelolaan minyak dan gas, dampaknya terhadap ekonomi masyarakat pesisir, serta

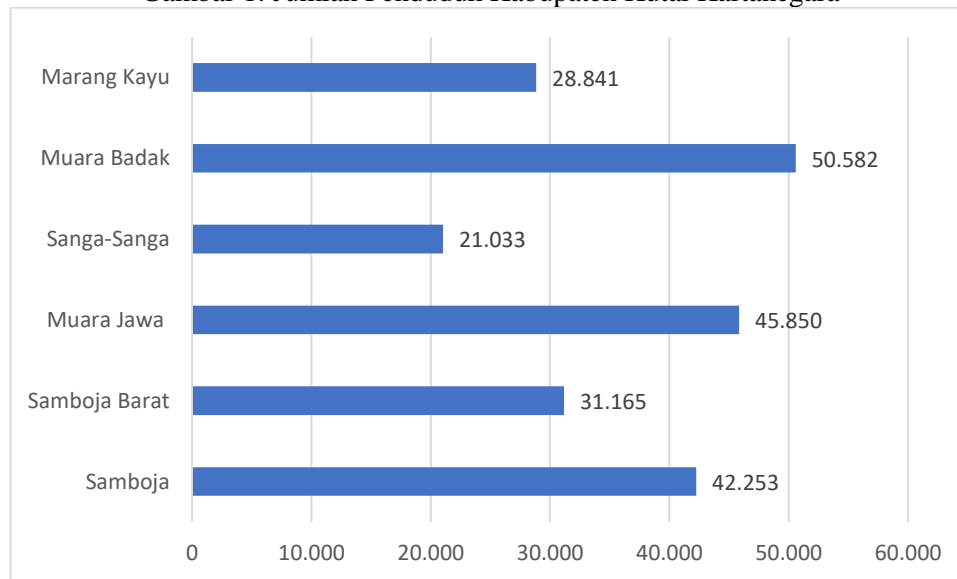
tantangan dalam redistribusi manfaat ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sektor migas berperan besar dalam perekonomian Kutai Kartanegara, distribusi manfaatnya masih terhambat oleh ketimpangan ekonomi di masyarakat pesisir. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan sumber daya alam menghadapi tantangan besar, termasuk kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, serta adanya indikasi kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, meskipun ada peluang untuk diversifikasi ekonomi melalui sektor pariwisata dan energi terbarukan.

Kata Kunci: Minyak dan Gas, Masyarakat Pesisir, Ketimpangan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terletak di provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian di Kalimantan Timur, khususnya dalam sektor sumber daya alam (SDA). Luas wilayah sekitar 27.891,13 km², dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 kecamatan dan pada tahun 2024 jumlah populasi mencapai 789.767 jiwa. Kutai Kartanegara dikenal sebagai salah satu kabupaten terbesar di Kalimantan Timur. Kabupaten ini memiliki wilayah pesisir yang kaya akan hasil laut dan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor pertanian, kehutanan, minyak dan gas. Wilayah pesisir Kutai Kartanegara yakni Kecamatan Marang Kayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja Barat dan Samboja. Muara Badak memiliki jumlah penduduk tertinggi, yakni 50.582 jiwa, diikuti oleh Muara Jawa dengan 45.850 jiwa, wilayah dengan jumlah penduduk terendah adalah Sanga-Sanga dengan 21.033 jiwa (Kukar, 2025)

Gambar 1: Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Lapangan usaha di sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas, telah menjadi kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir. Sektor ini mengalami peningkatan signifikan, dengan kontribusinya mencapai 490,05 triliun rupiah atau sekitar 53,18 persen pada tahun 2022, 364,26 triliun rupiah atau sekitar 43,18 persen pada tahun 2023, dan 329,46 triliun rupiah pada tahun 2024 (Kaltim, 2024). Sektor ekstraktif seperti minyak dan gas di Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak terlepas dari tantangan sosial-ekonomi. Masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran sering kali tidak merasakan manfaat langsung dari sektor ini. Sebagian besar penduduk pesisir

mengandalkan sektor perikanan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara sebagian kecil dari masyarakat mendapatkan peluang kerja dari industri minyak dan gas (Mulyadi, 2017). Ketimpangan ini menciptakan gap sosial-ekonomi antara masyarakat pesisir dan masyarakat yang tinggal di sekitar pusat industri, sehingga memperburuk ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas di Indonesia, khususnya di daerah penghasil seperti Kutai Kartanegara, sering kali berfokus pada optimalisasi pendapatan daerah, tanpa mempertimbangkan secara maksimal kesejahteraan masyarakat lokal (Rijal, 2018). Banyak kebijakan yang hanya memberikan perhatian pada aspek ekonomi makro, sementara dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir sering terabaikan. Dalam konteks ini, penting untuk menilai dampak ekonomi dari kebijakan pengelolaan minyak dan gas, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir. Dalam penelitian (Ayodya et al., 2024) ditekankan bahwa peran perusahaan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, melalui pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengintegrasian potensi alam dalam strategi CSR dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir. Penelitian yang dilakukan oleh (Purwatiningsih Annisa & Masykur, 2021) mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di laut Kepulauan Natuna mengungkapkan bahwa pengelolaan sumber daya alam migas di wilayah pesisir menghadapi tantangan yang serupa dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama dalam hal ketimpangan distribusi manfaat dan terbatasnya pemberdayaan masyarakat lokal. Meskipun sektor migas memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan di daerah, ketimpangan ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan redistribusi hasil sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan migas.

Sebagai kabupaten yang kaya akan sumber daya alam, Kutai Kartanegara menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Penting bagi para pembuat kebijakan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dalam pengelolaan minyak dan gas, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor industri, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ada, serta mengembangkan strategi kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal, untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode literature review dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi berbagai literatur yang relevan (Hardani, Helmina Andriani, 2020), mengenai kebijakan pengelolaan minyak dan gas di Kabupaten Kutai Kartanegara serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat pesisir. Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria relevansi topik, kualitas sumber, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar dan Science Direct, menggunakan kata kunci seperti "pengelolaan minyak dan gas", "dampak ekonomi masyarakat pesisir", "kutai kartanegara", dan "kebijakan publik". Literatur yang dipilih membahas kebijakan pengelolaan SDA, dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal, dan isu-isu terkait ketimpangan sosial serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema utama yang relevan, seperti kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dampak ekonomi terhadap masyarakat pesisir, ketimpangan sosial, dan evaluasi kebijakan publik. Literatur-literatur yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan minyak dan gas di Kutai Kartanegara. Fokus utama dalam analisis ini adalah untuk

menilai bagaimana kebijakan pengelolaan tersebut berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, baik dalam aspek positif seperti peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, maupun dalam aspek negatif seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas di Kutai Kartanegara

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pengelolaan sektor minyak dan gas (migas) menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk mengatur dan mengoptimalkan potensi migas yang dimiliki daerah ini. (UU No.22, 2001) tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki tujuan yang sangat strategis dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha di sektor migas. Dalam pasal-pasalnya menekankan tiga aspek untuk masyarakat yang perlu dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sektor migas dapat berperan sebagai pendorong kemakmuran masyarakat secara adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang merata, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Meskipun sektor migas berkontribusi besar terhadap perekonomian, manfaatnya sering kali tidak merata. Masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan eksploitasi minyak dan gas sering kali tidak merasakan dampak positif secara langsung. Sebagai contoh di salah satu daerah pesisir yakni Samboja pada strategi penanggulangan kemiskinan yang seharusnya dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka pendek yaitu melakukan intervensi langsung kerumah tangga miskin dengan menanggulangi beberapa indikator kemiskinan, sedangkan secara jangka panjang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga miskin (Novianto & Subandi, 2020).

Usaha pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah daerah Kutai Kartanegara, terlihat melalui (Perda Kukar No. 3, 2017) mengatur Rekrutmen memprioritaskan kepada pencari kerja warga kutai kartanegara melalui sistem yang kompetitif. Perda tersebut mengatur pengelolaan SDA secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun ada upaya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, masih terdapat kesenjangan antara pendapatan yang dihasilkan oleh sektor migas dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada perlu lebih fokus pada pengembangan kapasitas masyarakat, peningkatan keterampilan, serta pemerataan akses terhadap peluang ekonomi yang ada, agar manfaat dari pengelolaan SDA dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

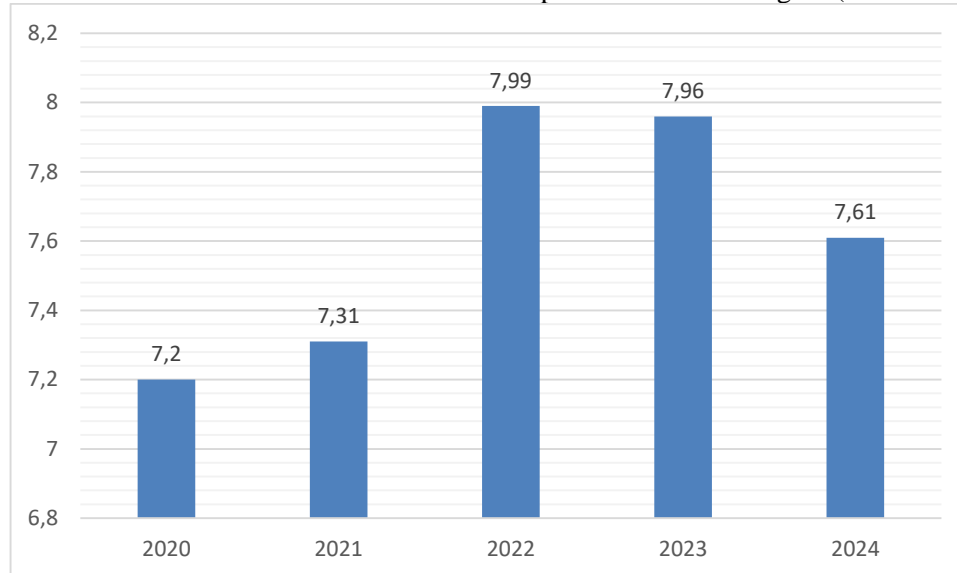
Dampak Ekonomi Terhadap Masyarakat Pesisir

Kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai Rp135,406 triliun atau 25% dari PDRB Kalimantan Timur, Kutai Timur menyumbang Rp104,663 triliun atau 19%, dan Balikpapan menyumbang Rp97,060 triliun atau 18% (Redaksi, 2024). Keberadaan sektor hulu migas tidak hanya memberikan dampak langsung, tetapi juga memiliki dampak tidak langsung serta efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Oleh karena itu, kontribusi sektor hulu migas perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Kutai Kartanegara guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat (Kinanthi & Indrayati, 2022). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan redistribusi hasil sumber daya alam secara adil, agar pemerataan kesejahteraan dapat tercapai, terutama mengingat sering terjadinya ketimpangan ekonomi (Novemyanto, 2024).

Sebagai ilustrasi, meskipun sektor migas memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang perlu perhatian lebih. Berdasarkan data yang ada, persentase penduduk miskin di Kutai Kartanegara pada tahun 2022 mencapai 7,99%, meskipun pada tahun 2023 dan 2024

sedikit menurun menjadi 7,96% dan 7,61% masing-masing, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara (2020-2024)



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Pemerataan hasil ekonomi yang dihasilkan dari sektor migas masih perlu diperbaiki oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam redistribusi pendapatan serta pemberdayaan masyarakat lokal, agar sektor migas benar-benar dapat membawa manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir

Pada aspek yang lain terjadi peningkatan infrastruktur terkait dengan sektor migas yang dirasakan, terutama di daerah pesisir yang menjadi pusat operasional industri. Misalnya, Samboja dan Muara Badak, yang merupakan wilayah penghasil migas utama di Kutai Kartanegara, telah mengalami peningkatan dalam hal akses jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan sebagai akibat dari investasi yang masuk dari perusahaan-perusahaan migas.

Walaupun sektor migas memberikan dampak positif pada beberapa sektor, ketimpangan ekonomi tetap menjadi masalah signifikan, terutama antara mereka yang mendapatkan manfaat langsung dan yang tidak. Sebagai contoh, meskipun Muara Badak dan Samboja mendapatkan manfaat dari sektor migas, Sanga-Sanga dan beberapa kecamatan pesisir lainnya mengalami stagnasi ekonomi karena kurangnya akses terhadap pekerjaan yang terkait langsung dengan industri migas. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Mulyadi, 2017), ketimpangan pendapatan antara kecamatan yang memiliki akses langsung terhadap kegiatan migas dan kecamatan yang tidak terlibat langsung sangat mencolok. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan berbagai upaya untuk mendiversifikasi perekonomian masyarakat pesisir agar tidak hanya bergantung pada sektor minyak dan gas. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan adalah melalui pengembangan sektor pariwisata dan pertanian. Misalnya, di daerah Muara Badak, yang memiliki potensi ekowisata, pemerintah daerah mendorong pengembangan pariwisata berbasis lingkungan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Pengembangan agroindustri juga mulai diperkenalkan di daerah pesisir, seperti di Samboja, dengan memfokuskan pada produk olahan hasil perikanan dan pertanian.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara tahun 2020-2025, setidaknya ada 10 sasaran yang harus dicapai dalam program pembangunan di daerah, salah satunya yakni berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian yang memberikan

nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya (Admin, 2021). Sektor pariwisata ditargetkan untuk tumbuh dengan fokus pada kawasan ekowisata yang ada di sekitar kawasan pesisir. Program-program pelatihan keterampilan untuk masyarakat pesisir dalam bidang pariwisata, kerajinan lokal, serta pengolahan hasil perikanan dan pertanian juga telah dijalankan untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal. Tantangan terbesar dalam diversifikasi ekonomi adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam sektor-sektor non-migas. Pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan diversifikasi ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat menciptakan sinergi pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dan terutama berdampak pada perekonomian masyarakat pesisir (Suweda, 2025).

Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan minyak dan gas di Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi sejumlah tantangan besar, baik dari segi kebijakan, keterlibatan masyarakat, maupun kerjasama antar pemangku kepentingan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksiharasan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan di lapangan. Kebijakan yang ada seringkali lebih fokus pada optimalisasi pendapatan daerah dari sektor migas, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Peraturan Daerah yang telah disusun untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan masih sering kesulitan untuk dilaksanakan secara efektif, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sektor migas juga menjadi tantangan besar. Sebagian besar masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran minyak dan gas merasa tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya akses informasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan industri migas

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, ada sejumlah peluang untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan di Kutai Kartanegara. Salah satu peluang terbesar adalah diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Pengembangan sektor pariwisata berbasis ekologi, seperti yang dilakukan di Muara Badak dan Samboja, dapat menjadi alternatif sumber pendapatan baru yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkenalkan masyarakat pesisir pada bentuk ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Peluang lainnya adalah pembangunan energi terbarukan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga angin atau panel surya di daerah pesisir, yang dapat mendukung kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Pemerintah daerah, melalui RPJMD 2020-2025, telah merencanakan untuk mengembangkan sektor energi terbarukan dengan target 10% dari total kebutuhan energi daerah pada tahun 2025 (Budiaris, 2025). Di samping itu, kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan migas, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan migas dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih menyeluruh di wilayah pesisir, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang dapat langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Program-program ini juga perlu disertai dengan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir agar mereka bisa memanfaatkan peluang kerja di sektor lain yang lebih berkelanjutan.

Untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan SDA, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kegiatan industri di wilayah pesisir seperti penggalian minyak dan gas dapat secara signifikan mempengaruhi ekologi an fungsi-fungsi zona pesisir (Sudiarta, 2024). Prinsip ekologis yang bertujuan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, jika eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berlebihan dan intensif akan merusak lingkungan. Dengan kata lain, penataan ruang bertujuan menciptakan tata ruang yang mampu mengakomodasi seluruh kegiatan secara seimbang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup (Sylviani & Yosefi Suryandari, 2017). Perbaikan kebijakan yang

- 0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSA
T_STRATEGI_MELESTARI
- Kinanthi, Y., & Indrayati, A. (2022). Keterkaitan Antara Sebaran Pertambangan Migas Dan Multiplier Effect Bagi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Geo Image, 11*(2), 148–161. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage>
- Kukar, B. (2025). KUKAR dalam angka Tahun 2025. In *BPS Kukar* (Vol. 23, Issue 1). BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSA_T_STRATEGI_MELESTARI
- Mulyadi. (2017). *Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terletak di provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor sumber daya alam (SDA). Luas wilayah sekitar 27.891,13 km², dengan adanya perkembangan dan pemekar.* Penerbit Alam Raya.
- Novemyanto, A. D. (2024). Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. *Jurnal Esensi Hukum, 6*(1).
- Novianto, E., & Subandi, M. (2020). Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam (Studi Kasus Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara) Poverty in Region Rich in Natural Resources (Case Study of Samboja Sub District , Kutai Kartanegara Regency). *Journal PKS, 19*(1), 63–75. https://www.academia.edu/download/84068175/aanhidayatulloh_2C_07._Nofri.pdf_filename_UT-F-8aanhidayatulloh_2C_07._Nofri.pdf
- Perda Kukar No. 3 (2017).
- Purwatiningsih Annisa, & Masykur. (2021). EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI LAUT NATUNA BAGIAN UTARA LAUT YURIDIKSI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN NATUNA. *Reformasi, 2*, 59–67.
- Redaksi. (2024). *PDRB Kaltim Tahun 2023 Rp537,630 T, Kontributor Terbesar Kukar, Balikpapan dan Kutim.* Niaga Asia. <https://www.niaga.asia/pdrb-kaltim-tahun-2023-rp537630-t-kontributor-terbesar-kukar-balikpapan-dan-kutim/> (accessed 27 Juni 2025)
- Rijal. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Isu dan Tantangan.* Masyarakat Indonesia.
- Sudiarta, K. (2024). *PENGLOLAAN PESISIR TERPADU.* Scopindo Media Pustaka.
- Suweda, G. R. D. (2025). *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut.* Qriset Indonesia.
- Sylviani, S., & Yosefi Suryandari, E. (2017). Dampak Pengembangan Sektor Ekonomi Terhadap Potensi Konflik Di Kphp Delta Mahakam Dan Kphl Sungai Beram Hitam. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 14*(3), 171–190. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2017.14.3.171-190>
- UU No.22, 1 (2001). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>